I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam menggunakan pinjaman baik dari dalam maupun dari luar negeri merupakan salah satu cara untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi. Hal ini dilakukan karena penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dengan demikian, utang menjadi salah satu faktor yang menentukan akan terjadinya kesinambungan fiskal *(fiscal sustainability)* dari suatu anggaran pemerintah negara. Dalam pemerintahan Indonesia, hal ini akan terkait erat dengan sejauh mana kemampuan pemerintah dalam manajemen fiskal dalam APBN dengan sebaik mungkin.

Pinjaman luar negeri merupakan alternatif yang relatif tepat dalam membiayai kekurangan modal pembangunan. Pemerintah menjalankan kebijakan strategi pembangunan dengan memanfaatkan dana pinjaman luar negeri tampaknya belum juga mampu memandirikan keuangan anggaran pemerintah. Ketergantungan pemerintah terhadap pinjaman luar negeri dari tahun ke tahun semakin bertambah. Dana pinjaman luar negeri yang semestinya hanya bersifat sebagai pelengkap, menjadi semacam kebutuhan yang sulit dihentikan dengan pertimbangan untuk menjaga momentum pembangunan tersebut.

Keluarnya Indonesia dari keanggotaan IMF serta krisis ekonomi yang dialami Indonesia pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan peningkatan utang swasta dan pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, inflasi yang tinggi, pertumbuhan menjadi melambat dan menyebabkan defisit anggaran negara. Krisis ekonomi telah membuat pemerintah Indonesia terbelit utang yang berat. Utang pemerintah telah bertambah menjadi tiga sampai empat kali lipat dari kondisi sebelum krisis, dan hampir tiga perempat dari pertambahan ini merupakan utang dalam negeri yang harus dibayar untuk restrukturisasi perbankan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesinambungan fiskal *(fiscal sustainability)* pemerintah Indonesia. Kewajiban-kewajiban penutupan utang baik bunga dan amortisasi akan melebihi 40 persen dari penerimaan pemerintah selama beberapa tahun, sedangkan kebutuhan pembiayaan baru baik luar maupun dalam negeri di tahun-tahun mendatang masih tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran.

Dengan adanya kewajiban utang pemerintah (dalam negeri dan luar negeri), hal ini telah memberikan tekanan APBN yang sangat besar sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan *fiscal stimulus* bagi pertumbuhan ekonomi. Akibat beban untuk memenuhi kewajiban utang yang begitu besar hal ini akan sangat membatasi fleksibilitas fiskal pada masa pemerintahan sekarang ini, sehingga telah menggeser permasalahan dari *fiscal stimulus* menjadi *fiscal sustainability***.** Artinya yang perlu dipikirkan dan dilakukan adalah langkah-langkah strategis diberbagai bidang untuk menjamin agar Indonesia terhindar dari krisis fiskal yang dapat berdampak sangat destruktif terhadap pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang.

Mengenai masalah kesinambungan fiskal merupakan dasar bagi kestabilan makro ekonomi jangka pendek dan tentunya pertimbangan-pertimbangan yang diambil harus lebih bersifat jangka panjang. Kekuatan fiskal pemerintah tergantung pada kesinambungan yang dapat diketahui dari posisi fiskalnya. Kesinambungan fiskal kembali tergantung sampai pada batas mana pemerintah, pada saat sekarang akan perlu menyesuaikan kebijakan fiskalnya di masa yang akan datang agar terhindar dari ledakan utang. Kebijakan fiskal dapat dianggap berkesinambungan jika pemerintah tak mengalami kesulitan keuangan untuk membiayai anggarannya dalam jangka waktu tak terbatas. Implikasinya: kesinambungan fiskal akan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah untuk memperoleh sumber penerimaan pajak melalui pertumbuhan ekonomi, efisiensi kebutuhan anggaran melalui peningkatan penerimaan maupun penajaman pengeluaran, serta sumber pembiayaan melalui penerimaan nonpajak, seperti penjualan aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau privatisasi dan restrukturisasi utang.

Definisi yang sederhana, suatu anggaran fiskal dikatakan berkesinambungan jika hingga jangka waktu yang tak terhingga, rasio penerimaan dan aset (atau utang) pemerintah terhadap PDB minimal mampu membiayai total pengeluaran pemerintah per PDB. Dengan demikian, kesinambungan fiskal mensyaratkan adanya upaya dari pemerintah untuk menyeimbangkan anggaran dalam jangka panjang, atau paling tidak mengembalikan posisi rasio utang pemerintah terhadap PDB ke posisi awal. Secara umum kesinambungan fiskal akan diperoleh ketika terjadi keseimbangan antara sisi pendapatan negara dan belanja negara dan jika terjadi defisit anggaran maka dituntut untuk kebijakan pembiayaan yang efektif.

Pembahasan kesinambungan fiskal erat kaitannya dengan APBN. Untuk itu Pemerintah selalu berupaya secara optimal mengarahkan APBN untuk melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal demi mencapai kesinambungan fiskal. Penerapan aturan kebijakan sangat penting untuk melakukan konsolidasi fiskal. Kebijakan yang efektif ditujukan untuk memastikan kesinambungan fiskal jangka panjang dan untuk mengantisipasi peningkatan pengeluaran. Defisit APBN diupayakan menurun secara bertahap, sejalan dengan upaya penyehatan APBN melalui pinjaman luar negeri yang saat ini masih tetap dilakukan pemerintah walaupun dalam jumlah yang semakin menurun. Pinjaman luar negeri yang dilakukan dapat dalam bentuk pinjaman kegiatan *(project financing)* maupun pinjaman program *(cash financing)* (Nota Keuangan dan RAPBN 2010).

Kesinambungan fiskal menjadi kondisi perlu *(necessary condition)* bagi pemerintah untuk bisa mandiri secara fiskal dan secara ekonomi selepas dari IMF. Terdapat dua langkah strategis yang diupayakan pemerintah menuju kesinambungan fiskal, yaitu menurunkan defisit APBN secara bertahap menuju kondisi seimbang atau surplus dan melakukan manajemen pembiayaan anggaran yang optimal, efisien, dan efektif. Penurunan defisit APBN dimaksudkan agar tambahan beban pembiayaan, yang terutama berasal dari utang, dapat dikurangi sehingga secara bertahap rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi semakin berkurang. Sementara itu, pengelolaan pembiayaan anggaran lebih diutamakan kepada pembiayaan dari utang dalam negeri dengan pengoptimalan pemanfaatan sumber pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan dari luar negeri akan terus diupayakan untuk semakin berkurang, dengan pengelolaan yang sesuai kebijakan untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Pengukuran kesinambungan fiskal penting untuk menilai kemampuan anggaran pemerintah. Ukuran kesinambungan fiskal yaitu rasio keseimbangan primer terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB. Secara umum, terdapat dua indikator utama pengukuran kesinambungan fiskal yaitu keseimbangan primer (primary balance) dan rasio utang terhadap PDB (*debt to GDP ratio*). Menurut Cuddington (1996) seperti dikutip oleh (Bagus Santoso, 2006: 239) keseimbangan primer (primary balance) merupakan indikator utama bagi kesinambungan fiskal. Sementara itu, menurut Cohen (2000) dan Marks (2003) seperti dikutip oleh (Tim PP FE UGM, 2004: 17) menggunakan parameter rasio utang terhadap PDB sebagai indikator utama untuk pengukuran kesinambungan fiskal.

Kemudian indikator kesinambungan fiskal yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi suatu negara. Menurut Roubini (2001) seperti dikutip oleh (Bagus Santoso, 2006: 241) menyebutkan bahwa jika perekonomian negara cukup terbuka dan hambatan perdagangan cukup kecil, maka indikator rasio utang terhadap ekspor dapat digunakan. Namun begitu, rasio utang terhadap ekspor hanya cocok bagi negara-negara yang mengandalkan sektor perdagangan internasional dan memiliki surplus yang kuat. Sebaliknya, jika volume perdagangan internasional terbatas dan tingkat keterbukaan kecil, maka penggunaan rasio utang terhadap PDB akan memberikan ukuran yang lebih baik. Berdasarkan pernyataan diatas, Indonesia merupakan negara yang memiliki volume perdagangan internasional yang terbatas. Untuk itu penulis menggunakan rasio utang terhadap PDB sebagai indikator kesinambungan fiskal.

Salah satu indikator yang digunakan sebagai pedoman untuk menilai apakah kebijakan fiskal berkesinambungan atau tidak adalah rasio utang terhadap PDB.

Semakin tinggi rasio utang terhadap PDB, maka beban utang terhadap fiskal semakin tinggi sehingga dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam menggunakan anggarannya. Berdasarkan peraturan perundangan kesinambungan fiskal di Indonesia dikontrol melalui indikator maksimum utang sebesar 60 persen dari PDB. Pemenuhan target pembiayaan defisit melalui utang diupayakan tetap dapat dijaga agar rasio utang berada di bawah 60 persen dari PDB, bahkan dalam strategi pengelolaan utang dan RJPM tahun 2004-2009 rasio utang terhadap PDB ditargetkan bisa berada di bawah 40 persen pada akhir tahun 2009 (Nota Keuangan dan RAPBN 2010).

Dan untuk batas aman rasio utang terhadap PDB yaitu sebesar 30 %. Bila rasio utang terhadap PDB melebihi dari 30 % sudah di anggap bahaya (Suseno, 1990 : 72). Kebijakan fiskal yang mengakibatkan rasio utang pemerintah terhadap PDB meningkat secara terus menerus dianggap sebagai kebijakan fiskal yang tidak berkesinambungan. Dengan demikian berdasarkan indikator ini, kebijakan fiskal dapat disebut berkesinambungan apabila kebijakan fiskal dimaksud dapat memelihara rasio utang terhadap PDB minimal konstan, atau secara bertahap menurun. Jika pertambahan utang diiringi dengan kenaikan PDB yang sama ataupun lebih besar bukanlah merupakan ancaman bagi kesinambungan fiskal.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Utang Dan Rasio Utang terhadap PDB Indonesia Atas Harga Konstan 2000 Periode 1999-2009.

Tahun	Pinjaman Luar Negeri (Triliun Rupiah)	Surat Berharga Negara (Triliun Rupiah)	Total Utang (Triliun Rupiah)	Rasio Utang Terhadap PDB (dalam persen)
1999	438	502	940	89%
2000	583	652	1.234	89%
2001	613	661	1.273	77%
2002	570	655	1.225	67%
2003	583	649	1.232	61%
2004	637	662	1.299	57%
2005	620	693	1.313	47%
2006	559	743	1.302	39%
2007	586	803	1.389	35%
2008	730	906	1.637	33%
2009	732	968	1.700	27%

Sumber : Departemen Keuangan

Tabel 1 di atas menunjukkan Secara jumlah utang Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Namun secara rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) utang Indonesia terus menurun. Dari tahun 1999 – 2000 rasio utang mengalami peningkatan. Pada tahun 2000, sewaktu proses rekapitalisasi perbankan rampung, utang Pemerintah mencapai Rp 1.234 triliun atau sekitar 89 persen dari PDB. Rasio utang terhadap PDB cenderung menurun dari tahun ke tahun, bahkan sejak tahun 2006 telah berada dalam posisi di bawah 40 persen. Hal ini mengindikasikasikan bahwa jumlah utang yang ditarik oleh pemerintah setiap tahun telah dilakukan secara hati-hati, terencana, dan tepat sasaran sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional telah mendorong peningkatan ekonomi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan peningkatan utang itu sendiri. Hingga tahun 2009 rasio itu turun hingga mencapai 27 persen dari PDB, diharapkan tahun-tahun ke depan akan seperti itu trendnya. Keberhasilan

pemerintah menurunkan rasio utang pada 2009 menjadi 27 persen, tercapai seiring kenaikan nilai tukar rupiah.

Persoalan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) telah mendapatkan perhatian yang besar sejak beberapa abad yang silam. Pertumbuhan ekonomi dibutuhkan dan merupakan sumber utama peningkatan standar hidup penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Dengan perkataan lain, kemampuan dari suatu negara untuk meningkatkan standar hidup penduduknya adalah sangat tergantung dan ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang (*long run rate of economic growth*) (Muana Naga, 2005: 279).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila tingkat kegiatan ekonominya adalah lebih tinggi dari yang dicapai sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi baru tercipta bila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif, stabilitas ekonomi harus tetap dijaga. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat mempengaruhi kesinambungan fiskal Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat membawa implikasi bahwa aktivitas perdagangan pasar berjalan dengan baik dan meningkatnya permintaan pasar. Jika pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan stok utang, maka kondisi fiskal aman dalam pembayaran utang.

Tabel 2. Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000 Periode 1999 – 2009.

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Persen)
1999	1.80
2000	4.77
2001	3.38
2002	4.50
2003	4.80
2004	5.00
2005	5.70
2006	5.55
2007	5.60
2008	6.50
2009	4.90

Sumber : Bank Indonesia Lampung

Tabel 2 menunjukkan jumlah perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 1999 – 2009. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 1999 - 2000 mengalami peningkatan. Kemudian mengalami penurunan ditahun 2001 sebesar 3.38%. Mengalami peningkatan kembali ditahun 2002 - 2005 sebesar 5.70%. Di tahun 2006 pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan. Kemudian mengalami peningkatan kembali ditahun 2007 – 2008. Dan ditahun 2009 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 4.90%.

Krisis yang dialami Indonesia tahun 1997 merupakan efek penularan krisis nilai tukar yang menimpa mata uang Thailand, Bath, dan diikuti oleh negara-negara lainnya di Asia. Sehingga pada tahun 1997 cadangan devisa pemerintah Indonesia mengalami penurunan dalam waktu relatif singkat. Melonjaknya nilai tukar berdampak pada terjadinya defisit pada neraca pembayaran yaitu terjadinya defisit transaksi berjalan *(current account)* kemudian diikuti defisit pada neraca modal

(capital account). Capital outflow-pun terjadi dan tidak diikuti oleh masuknya pendapatan devisa pemerintah yang berasal dari ekspor. Hal ini terjadi karena tingkat *uncertainty* terhadap ketidakstabilan nilai tukar rupiah. Dengan kondisi inilah yang memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan peminjaman terhadap *Internasional Monetary Fund* (IMF) dengan tujuan untuk menambah cadangan devisa dalam rangka mengurangi *gap* pada neraca pembayaran (Robert dan Gafari, 2007: 3).

Dalam pembayaran utang terkhususnya utang luar negeri, pembayarannya biasanya dilakukan dalam mata uang Amerika. Kondisi nilai tukar yang menguat dan ekspor yang meningkat mencerminkan cadangan devisa Indonesia bertambah. Bila nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika maka pembayaran utang luar negeri dalam mata uang dolar dapat dilakukan tanpa adanya beban yang berat dari anggaran fiskal. Untuk itu diharapkan pemerintah tetap menjaga kestabilan dari nilai tukar rupiah sehingga dapat menjaga kesinambungan fiskal Indonesia.

Tabel 3. Data Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Atas Dasar Harga Konstan 2000 Periode 1999 – 2009.

Tahun	Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika (Rp/US$)
1999	8908
2000	8534
2001	10410
2002	9282
2003	8576
2004	8985
2005	9750
2006	9141
2007	9163
2008	9756
2009	9380

Sumber : Bank Indonesia Lampung

Tabel 3 menunjukkan jumlah perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika(US$). Dari tahun 1999 – 2009 nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika cenderung menguat. Dalam tahun 1999 - 2001, nilai tukar cenderung melemah sebesar Rp10.410 per US$. Kemudian ditahun 2002 – 2004 nilai tukar cenderung menguat mencapai sebesar Rp8.985 per US$. Tahun 2006 – tahun 2007 nilai tukar cenderung menguat. Sebab, penguatan rupiah pada tahun tersebut didukung oleh kondisi ekonomi global yang kondusif dan fundamental ekonomi domestik yang cukup baik. kebijakan makro ekonomi nasional yang dijalankan secara konsisten dan hati-hati mampu menahan tekanan terhadap rupiah. Pada tahun 2008, dinamika nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi oleh perkembangan krisis keuangan global dan perlambatan ekonomi dunia yang memicu memburuknya persepsi investor dan ekspektasi pelaku pasar. Namun tahun 2008 nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil walau telah terjadi gejolak ekonomi

global. Kebijakan ekonomi makro yang konsisten dan berhati-hati yang disertai langkah stabilisasi nilai tukar secara umum dapat meredam terjadinya tekanan yang berlebihan. Sehingga tahun 2008 – 2009, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika berfluktuasi dengan kecenderungan yang menguat. Rata-rata nilai tukar rupiah pada periode tersebut sebesar Rp9.380 per dolar AS. Kecenderungan penguatan nilai tukar rupiah tersebut disebabkan oleh masuknya kembali investasi asing di pasar domestik sejalan dengan menguatnya optimisme terhadap segera pulihnya perekonomian global.

Menurut beberapa teori, pinjaman dalam negeri merupakan salah satu alat untuk menanggulangi inflasi karena menyerap uang yang beredar dalam masyarakat. Jadi pinjaman adalah suatu alat anti inflasi yang dapat mengurangi tenaga beli baik swasta maupun pemerintah. Begitu juga dengan pinjaman luar negeri, berdasarkan pengalaman Indonesia dapat digunakan untuk membendung inflasi melalui penggunaannya untuk mengimpor barang-barang baik barang konsumsi maupun alat-alat kapital, sehingga harga-harga akan tetap kalau tidak bahkan menurun. Hal ini disebabkan karena sifat inflasi di satu pihak adalah adanya kebanjiran tenaga beli sebagai akibat dari besarnya pengeluaran pemerintah yang dicerminkan dalam defisit anggaran belanja dan di lain pihak adanya kekurangan barang-barang dan jasa-jasa (Suparmoko, 2000: 276).

Pengendalian inflasi sangat diperlukan untuk kesinambungan fiskal. Apabila inflasi naik, menyebabkan melemahnya kurs rupiah yang diikuti dengan kenaikan harga-harga.

Tabel 4. Data Inflasi Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000 Periode 1999 – 2009.

Tahun	Inflasi Indonesia (Persen)
1999	5.70
2000	9.40
2001	11.50
2002	10.00
2003	6.80
2004	6.40
2005	17.11
2006	6.60
2007	6.59
2008	11.06
2009	2.78

Sumber : Bank Indonesia Lampung

Dari Tabel 4 menunjukkan pertumbuhan inflasi indonesia dari tahun 1999 – 2009. Yaitu pada tahun 1999 - 2001 inflasi Indonesia mengalami peningkatan. Dan tahun 2002 - 2004 inflasi Indonesia mengalami penurunan. Kemudian di tahun 2005 inflasi Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tinggi dan inflasi tahun 2005 merupakan pertumbuhan inflasi yang tinggi yaitu sebesar 17,11 %. Tahun 2006 - 2007 inflasi Indonesia mengalami penurunan dan tahun 2008 mengalami peningkatan yaitu sebesar 11,06%. Tahun 2009 Inflasi Indonesia cenderung mengalami penurunan.

B. Permasalahan

Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesinambungan fiskal di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap kesinambungan fiskal di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap kesinambungan fiskal di Indonesia?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesinambungan fiskal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap kesinambungan fiskal di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap kesinambungan fiskal di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

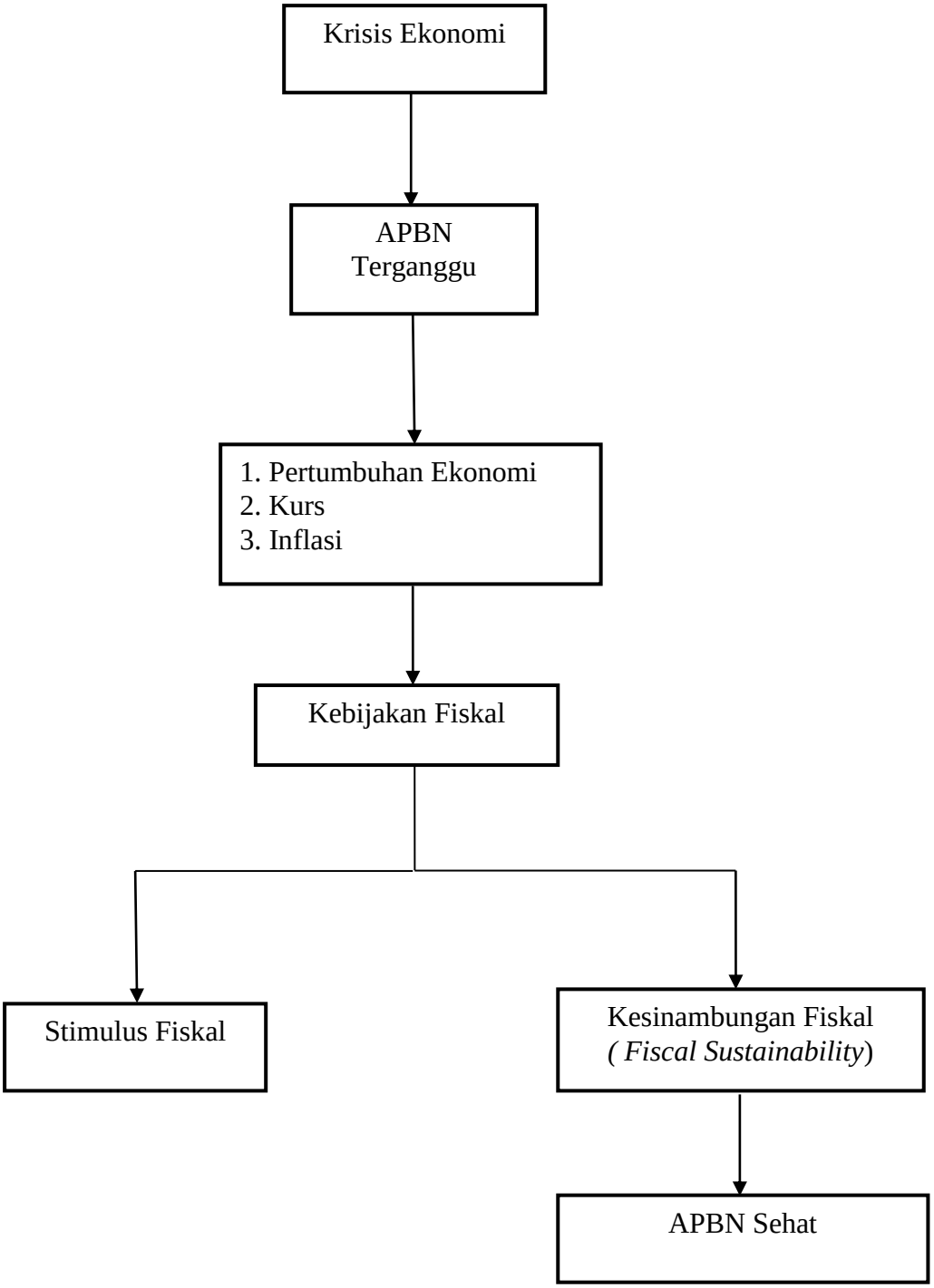

Berdasarkan alur diagram kerangka pemikiran di atas adalah kebijakan fiskal yang merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi makro mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial, yaitu stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengurangi pengangguran. Di Indonesia operasi fiskal pemerintah dilakukan melalui APBN, sehingga untuk dapat menjalankan peranan dan fungsi sentral kebijakan fiskal secara baik, APBN haruslah sehat, dapat dipercaya dan memiliki ketahanan fiskal yang berkelanjutan.

Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 menimbulkan tekanan fiskal yang berat bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi menjadi melambat bahkan sempat mengalami pertumbuhan minus, nilai utang luar negeri meningkat tajam karena pemerintah mengambil alih utang luar negeri sektor swasta yang mengalami gagal bayar, dan membengkaknya defisit transaksi berjalan pada neraca pembayaran yang menimbulkan beban biaya (*cost of crisis*) yang sangat berat bagi kondisi APBN Indonesia sehingga menyebabkan APBN terganggu.

Dalam upaya menanggulangi dampak krisis ekonomi, dimana kegiatan sektor swasta mengalami penurunan, APBN dituntut untuk dapat memainkan peranannya yang sangat penting dalam menciptakan stimulus fiskal bagi bergeraknya roda kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu Pemerintah melakukan kebijakan stimulus fiskal dengan pemberian insentif pajak, optimalisasi belanja negara terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur, alokasi belanja negara untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan pemberian dukungan pemerintah kepada swasta dalam pembangunan infrastruktur. Kebijakan stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah cukup agresif

sehingga pemerintah menghadapi *contingent liabilities* yang besar yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah jika terjadi peristiwa atau kejadian tertentu. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan fokus peran pemerintah dari stimulus fiskal menjadi kesinambungan fiskal. Artinya yang perlu dipikirkan dan dilakukan adalah langkah-langkah strategis diberbagai bidang untuk menjamin agar Indonesia terhindar dari krisis fiskal yang dapat berdampak sangat destruktif terhadap pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang. Kesinambungan fiskal erat kaitannya dengan APBN. Untuk itu Pemerintah selalu berupaya secara optimal mengarahkan APBN untuk melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal demi mencapai kesinambungan fiskal.

Besaran pertumbuhan ekonomi memang bisa menggambarkan kondisi perekonomian secara agregat, sehingga apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka dapat dikatakan tingkat kemakmuran juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi, kenudian melalui peningkatan investasi akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam upaya mencapai tingkat pinjaman yang sustainabel (berkelanjutan). Jika pertumbuhan ekonomi meningkat dengan cepat, kemampuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaannya secara nominal akan semakin besar sehingga menyiratkan pinjaman pemerintah akan mengalami penurunan (Budi Waluyo, 2003: 61).

Perkembangan nilai tukar rupiah mengalami perubahan begitu cepat lebih-lebih setelah pemerintah memasuki era *free floating*. Depresi rupiah akan berdampak pada berkurangnya daya saing ekspor sehingga penerimaan devisa yang sangat

dibutuhkan antara lain untuk pos penerimaan negara dan untuk pembayaran pinjaman luar negeri tidak tercapai. Melainkan dengan kenaikan nilai tukar rupiah akan menurunkan rasio pinjaman terhadap PDB sebab pemerintah memiliki kemampuan untuk pembayaran pinjaman khususnya pinjaman luar negeri.

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Peningkatan laju inflasi akan mengalami depresi rupiah. Inflasi dengan pinjaman pemerintah terdapat suatu hubungan bahwa jika inflasi meningkat, sementara pinjaman tidak mengalami peningkatan sehingga rasio pinjaman terhadap PDB nominal juga akan mengalami peningkatan oleh adanya inflasi.

Pertumbuhan ekonomi, nilai tukar dan inflasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kesinambungan fiskal di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang positif, apresiasi rupiah yang positif dan inflasi yang terkendali akan sangat mempengaruhi kesinambungan fiskal.

Kesinambungan fiskal menjadi kondisi perlu *(necessary condition)* bagi pemerintah untuk bisa mandiri secara fiskal dan secara ekonomi selepas dari IMF. Kesinambungan fiskal akan diperoleh ketika terjadi keseimbangan antara sisi pendapatan negara dan belanja negara dan jika terjadi defisit anggaran maka dituntut untuk kebijakan pembiayaan yang efektif. Secara teoritis, kebijakan fiskal yang berkesinambungan dapat dilanjutkan jauh kemasa depan tanpa harus mengancam kemampuan membayar pemerintah, dan atau tidak perlu menyiratkan adanya hutang yang terus meningkat.

Kebijakan fiskal yang berkesinambungan akan menyebabkan APBN sehat dan sinambung. Dari suatu kerangka berpikir tersebut penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul “ Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kesinambungan Fiskal *(Fiscal Sustainability)* di Indonesia” untuk melihat faktor-faktor Kesinambungan Fiskal di Indonesia.

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas akan memunculkan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kesinambungan fiskal di Indonesia.
2. Diduga nilai tukar berpengaruh terhadap kesinambungan fiskal di Indonesia.
3. Diduga inflasi berpengaruh positif terhadap kesinambungan fiskal di Indonesia.